

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau peradaban. Pada setiap fase kebutuhan manusia tentu saja terus mengalami penambahan. Baik dari kebutuhan yang sifatnya primer hingga tersier. Salah satunya terkait kebutuhan akan rekreasi atau wisata. Aktivitas rekreasi dan perjalanan tidak hanya menjadi peluang untuk menghibur diri tetapi juga menjadi sarana untuk menghilangkan stres, memulihkan keseimbangan emosional, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan atau dalam hal ini sering disebut dengan *leisure benefit*. Yan dalam (Roihanah & Sunarti, 2017 ; 93), menjelaskan *leisure benefit* sebagai persepsi subjektif setelah seseorang atau kelompok yang mengikuti berbagai kegiatan mengisi waktu senggang dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi pribadi dan kebutuhan akan kepuasan pribadi.

Hun dan Yan dalam (Roihanah & Sunarti, 2017 ; 93) mengelompokkan dimensi *leisure benefit* menjadi tiga bagian yang meliputi 1) *Physical Benefit* merupakan kesan subjektif atas suatu kegiatan yang dilakukan individu dan memiliki efek pada manfaat fisik seperti untuk pemeliharaan fisik, meningkatkan keterampilan fisik, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kesehatan fisik. 2) *Psychological Benefit* merupakan respon secara subjektif atas suatu kegiatan yang dilakukan individu yang memberikan manfaat psikologis seperti melepaskan tekanan hidup, membuat emosi menjadi tenang, mendapatkan perasaan senang,

membuat pikiran menjadi segar kembali. 3) *Social Benefit*, merupakan perasaan subjektif atas suatu kegiatan yang dilakukan individu yang mempunyai manfaat sosial, seperti menguatkan pertemanan, menjalin hubungan yang lebih intim dengan keluarga, pemahama bersama, mendukung ide-ide teman, memahami perasaan atau saling bertoleransi, pertukaran gagasan dengan teman.

Dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya, ditambah lagi dengan bentuk negara Indonesia yang sering disebut *archipelago* atau kepulauan dan beriklim tropis. Menjadikan negara kita surga dalam melakukan kegiatan wisata. Hal tersebut sendada dengan Undang-undang No.10 Tahun 2009 , menyebutkan potensi pariwisata yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari keanekaragaman budaya dan potensi wisata beragam dari tiap daerah yang bervariasi. Perkembangan wisata tidak terlepas dari bukti peningkatan wisatan dari tahun ketahun. Peningkatan signifikan jumlah peunjung baik dalam negeri (wisatawan nusantara) dan luar negeri (wisatawan mancanegara).

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Nasional

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Asing	Total
2018	303.400.000	15.810 305	319.210.305
2019	722.160.000	16.106 954	738.266.954
2020	524.570.000	4.052 923	528.662.923
2021	613.000.000	1.557.530	614.557.530
2022	734.860.000	5.471.277	740.331.277

Sumber : BPS 2023 (Diolah peneliti)

Dari data menunjukkan bahwasannya sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara dan mancanegara terus mengalami kenaikan sebesar 419.056.649 juta pengunjung. Pada tahun 2020 mengalami kemerosotan yang sangat signifikan, yaitu dengan total kemerosotan

tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 209.644.031 pengunjung. Hal serupa juga dialami oleh provinsi yang ada di Indonesia, contohnya adalah Jawa tengah.

Kepariwisata di Jawa Tengah dapat dikatakan berkembang dengan baik hal itu ditunjukkan dengan data pengunjung dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan data berikut ini :

Tabel 1. 2 Data Wisatawan Kabupaten Jawa Tengah

Tahun	Wisatawan asing	Wisataman Domestik	Total
2017	782.107	40.118.470	40.900.577
2018	677.168	40.118.470	50.620.775
2019	691.699	49.943.607	58.592.562
2020	78.290	57.900.863	22.707.375
2021	1793	22.629.085	21.334.202
2022	144.691	46.465.437	46.610.128

Sumber : BPS Kabupaten Jawa Tengah 2023 (Diolah)

Dari data diatas terlihat bahwasannya selama kurun waktu 3 tahun, yaitu 2017 sampai dengan 2019. Jumlah wisatawan di Jawa Tengah konsisten terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis, sama dengan yang dialami total pengunjung secara nasional. Hal itu karena adanya pandemic *covid-19*, yang menyebabkan semua sector mengalami kemunduran termasuk dalam kepariwisataan. Hal tersebut sesuai dengan beberapa temuan peneliti lain. Salah satunya adalah (Harsono et.al, 2021) Di masa pandemi *covid-19*, beberapa tempat wisata di Desa Pucung, seperti pantai dan lembah, terpaksa ditutup dan jarang dikunjungi wisatawan. Jawa Tengah sendiri memiliki beberapa daya Tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Daya Tarik Wisata Jawa Tengah

No	Tahun	Alam	Budaya	Buatan	Minat khusus	Lain-Lain
1.	2018	240	132	414	71	78
2.	2019	284	153	365	76	89
3.	2020	342	161	291	69	92
4.	2021	418	175	249	59	96
5.	2022	454	172	199	43	105

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2022

(Diolah)

Dari data tersebut terlihat bahwasannya wisata alam memiliki jumlah yang sangat banyak. Adapun terkadang wisata alam biasanya kurang diperhatikan, mengingat jumlahnya yang banyak dan tempatnya yang terkadang minim akses dan fasilitas.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Provinsi yang memiliki beberapa wisata bernuansa alam. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki panjang garis pantai sekitar 60 km. Dengan demikian dapat dikatakan Pati juga merupakan daerah pesisir. Menurut Harahab dalam (Ekosafitri *et al.*, 2017 ; 147) kawasan pesisir mempunyai potensi pembangunan yang sangat tinggi, potensi tersebut antara lain: 1) sumber daya yang dapat diperbaharui (hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dan sumber daya perikanan laut); 2) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan geologis; jasa-jasa lingkungan misalnya environmental service (kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi.

Dari beberapa keterangan tersebut apabila dilihat dari kondisi alam , terutama daerah pesisir Kabupaten Pati. Ekosistem mangrove merupakan potensi

yang dapat dikembangkan. Salah satu daerah di Kabupaten Pati yang memiliki potensi tersebut adalah Desa Kertomulyo, kecamatan Trangkil. Dimana daerah tersebut memiliki pantai yang bernama Pantai Kertomulyo dan menjadi habitat mangrove karena karakteristik pantai yang mendukung. Adapun pada saat ini Pantai Kertomulyo telah menjadi wisata yang berbasis ekowisata. Harto et.al dan Scheyvens dalam (Asriani *et al.*, 2021) mendefinisikan ekowisata sebagai proses konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sebagai ekowisata, Pantai Kertomulyo menjadi salah satu destinasi unggulan dengan nuansa alam di Kabupaten Pati dan memiliki beberapa keunggulan diantaranya, Luas hutan mangrove di Pantai Kertomulyo selalu mengalami peningkatan signifikan dari tahun-ketahun, berdasarkan data berikut :

Tabel 1. 4 Luas Hutan Mangrove Pantai Kertomulyo

No	Tahun	Luas Mangrove
1.	2017	± 9,99 Ha
2.	2018	± 11,58 Ha
3.	2019	± 13, 99 Ha
4.	2020	± 17, 5 Ha
5.	2021	± 21 Ha

Sumber : Mufidah Esti Walupi 2022 (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui luas tanaman mangrove di daerah pesisir Pantai Kertomulyo. Luas tanaman mangrove pada tahun 2017 hanya mencakup ± 9,99 Ha. Kemudian tahun 2018 naik sebesar 15,92% dan menjadi 11,58 Ha. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebanyak 20, 8 %. Sehingga luas hutan mangrove menjadi 13,99. Adapun pada tahun 2020 merupakan kenaikan yang signifikan ,yaitu bertambah menjadi 25,1 % dan areal mangrove menjadi 17,5 % . Pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan 20 % . Sehingga total luas hutan mangrove di Pantai

Kertomulyo menjadi 21 Ha. Dengan demikian dapat dikatakan pengembangan yang dilakukan sangat baik. Dikarenakan dari tahun ke tahun luasnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Keunggulan lain, memiliki SDM yang mumpuni dalam pengembangan pantai. Sebelum menjadi ekowisata, Pantai Kertomulyo sangatlah gersang dan minim tumbuhan. Kemudian dari situ sdm di desa ada yang menaruh perhatian. Yang kemudian melakukan kegiatan secara sukarela untuk memperbaiki lingkungan di pantai. Hingga diremikan sebagai tempat pariwisata pada tahun 2017. Pantai Kertomulyo masih minim beberapa spot berfoto. Adanya Spot foto pertama disana tentu saja menunjukkan hutan mangrove yang masih tidak terlalu luas dan semacam jembatan yang disebut dengan jembatan A, karena bentuknya menyerupai huruf a. Pada tahun berikutnya bertambah seperti, adanya gazebo-gazebo yang dapat dijadikan tempat berteduh dan berswafoto. Tidak berhenti disitu pengelola juga membuat suatu Menara dari kayu. Yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk melihat keindahan mangrove dari ketinggian, selain itu jembatan-jembatan juga semakin ditambah. Jembatan tersebut membelah diantara hutan mangrove. Sehingga pengunjung dapat berfoto sekaligus memberi kesan lebih dekat dan menyatu dengan mangrove. Dengan demikian tanpa adanya SDM yang memiliki kemauan merubah keadaan. Diawali dengan penanaman secara sukarela dan berlanjut pada kegiatan wisata, tetapi masih berfokus pada lingkungan. Pantai Kertomulyo tidak mungkin memiliki luasan mangrove yang terus bertambah signifikan tiap tahunnya.

Lebih lanjut, berhasil menjadi pariwisata berkelanjutan, dengan buktinya adalah pada tahun 2021 ikut menyongsong Kabupaten Pati dalam perlombaan perencanaan pembangunan daerah dan mendapat juara 1 tingkat provinsi. Dalam peraihan tersebut tentu tidak mudah karena melibatkan berbagai penilaian dan harus memenuhi beberapa indikator. Yang beberapa indikatornya dapat dilihat dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012. Yang menerangkan beberapa hal indikator diantaranya terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi, tersedianya sarana akomodasi yang memadai, tersedianya Jalan setapak pada minimal satu obyek wisata per-tahunnya, meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata, dan berbagai indikator lainnya.

Dalam mencapai keunggulan dalam pengembangan, Ekowisata Pantai Kertomulyo melibatkan sejumlah *stakeholder* yang memiliki peranan masing-masing. Menurut Riant Nugroho dalam (Fitri & Hardi, 2017) aktor dalam program pembangunan diklasifikasikan menurut posisinya (pembuat kebijakan, Koordinator, Fasilitator, pelaksana dan akselarator). Dari hal-hal yang diuraikan dapat dipahami bahwasannya. Sebelum menjadi daerah ekowisata, Pantai Kertomulyo mengalami perjalanan yang panjang dan terjadi kolaborasi dari beberapa *stakeholder* untuk menunjang perkembangan ekowisata Pantai Kertomulyo. Hal itu senada dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 pasal 51-52 tentang induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 dan perda No. 2 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan pariwisata Kabupaten Pati 2018-2025. Dalam peraturan tersebut memiliki keteresuaian, yang pada intinya dijelaskan untuk mencapai pembangunan pariwisata, kekuatan terbesar yang harus

diterapkan adalah terciptanya bentuk skema kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan suatu kolaborasi diperlukan kesatuan tujuan dan kerja sama dari beberapa *stakeholder* dalam mengembangkan suatu kepariwisataan.

Menurut Dwiyanto (2015:253), kerja sama secara kolaboratif antar pemangku kepentingan diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari jalan keluar atas permasalahan atau pada isu tertentu, yang dirasakan oleh berbagai pihak. Ketersediaan untuk melakukan kolaborasi muncul dikarenakan kemauan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dan mitranya sektor privat (Dwiyanto, 2015, p. 253). Menurut Emerson dan Nabatchi (2015: 4), kolaborasi *stakeholder* mencakup proses ketika dua atau lebih pihak berkumpul dan bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah atau isu bersama, atau berusaha mencapai tujuan bersama, yang biasanya terjadi ketika *stakeholder* tidak dapat mencapainya sendiri. Disini terdapat variabel, yaitu kerjasama dengan harapan untuk mencapai tujuan bersama. Cruz M. *et al* (2022: 2) berpendapat bahwa kolaborasi *stakeholder* adalah penggabungan berbagi informasi, sumber daya, kegiatan, dan kemampuan oleh organisasi di dua atau lebih sektor untuk mencapai bersama hasil yang tidak dapat tercapai apabila dilakuakn oleh organisasi dalam satu sektor secara terpisah. Dari definisi tersebut terdapat variabel komunikasi (berbagi informasi) dan kerjasama (berbagi sumber daya, kegiatan, dan kemampuan).

Dari berbagai definisi tersebut kolaborasi *stakeholder* dapat dimaknai sebagai kolaborasi *stakeholder* merujuk pada kerja sama dan interaksi antara

berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan dampak terhadap suatu proyek, organisasi, atau inisiatif tertentu. *Stakeholder* adalah individu, kelompok, atau entitas yang mempunyai kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan suatu program. Kolaborasi *stakeholder* melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, meminimalkan konflik, dan meningkatkan hasil secara keseluruhan. Kolaborasi merupakan pandangan yang melibatkan masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengambil keputusan, kebijakan yang dilaksanakan dan tata kelola. Orientasi keterlibatan ini berupaya menjawab permasalahan besar dan untuk memudahkan mencapai tujuan.

Atas beberapa hal yang telah diuraikan, pengembangan ekowisata di Pantai Kertomulyo, Kabupaten Pati, telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta pelestarian lingkungan melalui ekosistem mangrove yang terus berkembang. Beberapa keunggulan telah berhasil diraih tetapi tidak lepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jerih payah kolaborasi *stakeholder* dapat dikatakan sangat baik tetapi tetap saja masih ada yang mengganjal sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Melihat kembali terkait kunjungan Pantai Kertomulyo mengindikasikan adanya suatu permasalahan. Memang benar bahwasannya *covid-19* membawa dampak negatif bagi sektor pariwisata. Sebagaimana data-data *general* seperti kunjungan pariwisata di Indonesia secara keseluruhan yang turun drastis. Penurunan drastis tersebut terjadi pada tahun 2020 tetapi tahun berikutnya mengalami perbaikan dan justru tren kenaikan pengunjung.

Berbeda yang terjadi di Pantai Kertomulyo dari data kunjungan yang mengalami tren penurunan dibuktikan dengan data berikut :

**Tabel 1. 5 Jumlah Wisatawan
Pada Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo**

Nama Objek Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
Pantai Banyutowo	7.290	50.596	9.681	-	-
Pantai Idola	-	-	9.681	7.200	-
Pantai Kertomulyo	-	-	-	52.441	43.131

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2023 (diolah)

Dari data yang disajikan terlihat bahwasannya selama kurun waktu 5 tahun wisata Pantai di Pati hanya ada tiga. Hal tersebut tentu saja memprihatinkan. Dengan garis pantai yang cukup panjang, sektor wisata terutama pantai dapat dikatakan belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data jumlah pengunjung tidak dituliskan secara konsisten. Terutama pada Pantai Kertomulyo. Ekowisata Pantai Kertomulyo sendiri sudah berdiri sejak 2017 dengan diberikannya SK Pokdarwis kepada organisasi bernama Tresno Segoro. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada catatan sama sekali, sementara Pantai Kertomulyo sudah diakui secara resmi pada tahun 2017. Selain persoalan tersebut pada tahun 2021 Pantai Kertomulyo mengalami kenaikan drastis tetapi data terakhir tahun 2022 mengalami penurunan. Sehingga bagaimana sebenarnya kolaborasi yang terjadi diantara *stakeholder*. Dikarenakan dengan hal tersebut mengindikasikan ada *stakeholder* yang kinerja atau performanya menurun dan mengakibatkan proses kolaborasi yang terjadi juga mengalami penurunan oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Kertomulyo. Penelitian ini juga ingin melihat proses

kolaborasi *stakeholder* yang terjadi dan bagaimana kolaborasi ini berkontribusi terhadap konsistensi pengembangan ekowisata di tengah tantangan yang ada. Sehingga penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kerjasama *stakeholder* guna mencapai pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan lebih optimal di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Siapa *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo ?
2. Bagaimana proses kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa *stakeholder* dalam ekowisata Pantai Kertomulyo.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi *stakeholder* pada ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis tentang pemetaan *stakeholder* dan kolaborasi *stakeholder* itu sendiri dalam ekowisata Pantai Kertomulyo.
2. Penelitian dapat dijadikan referensi bagi pihak yang memerlukan. Khususnya bagi organisasi pemerintah, maupun pihak lain yang terlibat

dan membantu penemuan ide pemecahan masalah terkait kolaborasi *stakeholder* dalam ekowisata Pantai Kertomulyo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hal yang dipaparkan di dalam penelitian ini didasari oleh materi yang diajarkan selama masa perkuliahan. Sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kolaborasi *stakeholder*

2. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana analisis kolaborasi *stakeholder*, selain itu penelitian ini dapat lebih disempurnakan oleh peneliti-peneliti lain yang memiliki focus dan lokus yang sama. Sehingga dapat membantu Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo, dapat lebih berkembang melalui berbagai sumbangan pemikiran.

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini mampu mengupayakan sebuah solusi dalam mengupayakan sebuah sistem kolaborasi *stakeholder* dalam Ekowisata Pantai Kertomulyo. Yaitu dengan berkontribusi dalam hal saran atau masukan yang positif.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Alfiandri, dkk (2021), dengan judul “*Collaborative Governance Model for Mangrove Ecotourism: Bintan Island Case, Indonesia.*” Penelitian ini berfokus pada pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Bintan,

dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Lokasi penelitian adalah wilayah ekowisata mangrove di Pulau Bintan, yang dipilih karena potensinya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis interpretatif, meliputi wawancara mendalam, analisis tematik dengan perangkat lunak NVivo, dan triangulasi untuk validasi data. Tahapan penelitian meliputi identifikasi isu, analisis konteks, pengkodean data, dan klasifikasi kata kunci penting. Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah *Collaborative Governance*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan ekowisata, mencakup komitmen bersama dan proses deliberatif untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta konservasi lingkungan. Selain itu, pengelolaan ekowisata berbasis *Collaborative Governance* ditemukan dapat menciptakan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem mangrove.

Penelitian oleh Umar, dkk (2019), dengan judul Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lokus dan fokus dari jurnal ini adalah pengembangan ekowisata berbasis mangrove di Pulau Bintan, dengan penekanan pada penerapan tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*). Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk melakukan pengkodean deduktif. Teori utama yang diterapkan dalam penelitian ini

adalah teori tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dan mengurangi ego sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Bintan dapat memperkuat pendekatan Penta Helix, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya terkait dengan koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat lokal .

Penelitian oleh Choirul Ramadhan *et al.*, (2021), dengan judul “*Stakeholder* Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Desa Wisata Kandri Kota Semarang.” Berfokus pada kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan alamiah, di mana data dikumpulkan melalui dokumentasi, pengamatan, wawancara, dan studi literatur. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, perwakilan CSR dari PT.BPR BKK Kota Semarang, tim Pokdarwis Desa Wisata Kandri, serta tokoh masyarakat setempat. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif berperan penting dalam membangun relasi antara *stakeholder* dan dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat tiga tahap utama dalam pola kepemimpinan fasilitatif ini: komunikasi awal, pertemuan secara terbuka, dan penyelesaian serta pemberian solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Penelitian yang berjudul "Model Pentahelik dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang" ditulis oleh Tri Yuniningsih dari Universitas Diponegoro, Titi Darmi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Susi Sulandari dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang dengan fokus pada model kerjasama pentahelix dalam pengembangan pariwisata kota tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori Aktor Kebijakan dan Model Pentahelix sebagai kerangka teoritis utama, yang melibatkan lima elemen, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun model pentahelix telah diterapkan, kerjasama antar aktor belum optimal. Beberapa hambatan yang ditemukan termasuk kurangnya koordinasi dan kepercayaan antar aktor serta peran Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) yang belum optimal. Penelitian ini menyarankan revisi regulasi untuk memperkuat kerjasama antar aktor dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Penelitian oleh Purba *et al.*, (2021) dengan judul " Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang ". Penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata di Kota Semarang dengan menggunakan model pentahelix, yang melibatkan lima elemen utama: akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Desa Wisata Wonolopo. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pentahelix dari Michel

Callon, Bruno Latour, serta John Law, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara lima elemen utama tersebut dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunitas memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi elemen-elemen lain, kerjasama antara aktor-aktor ini belum optimal. Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) juga belum menjalankan tugasnya secara efektif.

Penelitian dari Rohmania Rohmania *et al.*, (2022) dengan judul "Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya". Merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teori utama Model Pentahelix menurut Kotler *et al* dalam Dian K, Duadji,N. dan Intan F M. (2021), yang meliputi (*Business, Government, Community, Academic dan media*) . Bertujuan untuk menganalisis peran aktor pentahelix serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor Pentahelix dalam pengembangan wisata taman aggrek belum berjalan dengan optimal. Pemerintah mendominasi mulai dari perencanaan, pembangunan, penganggaran hingga promosi dan keterlibatan *stakeholder* lain yang masih terbatas.

I Gede Eko Putra Sri Sentanu *et.al.*, (2021) juga melakukan penelitian tentang model kolaborasi dengan judul "Model Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Ekowisata: Studi Kasus dari Kota Batu, Provinsi Jawa Timur." Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menciptakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Teori utama yang dipakai adalah teori Pentahelix dengan penggabungan prinsip *triple bottom* (lingkungan hidup, ekonomi dan sosial). Hasil penelitian menunjukkan kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Pentahelix Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengembangan ekowisata di Kota Batu, Indonesia.

Nuh *et al.*, (2024) melakukan penelitian tentang model kolaborasi dengan judul “*Collaborative Governance Model In Sustainable Village Tourism Development (Case Study: Kemiren Village Tourism In Ijen Crater Geopark Cultural Site)*.” Tipe penelitian adalah kualitatif dan teori yang dipakai, yaitu model kolaborasi dari Ansell and Gash (*starting condition, Institutional design, Facilitative Leadership, Collaborative Process dan Outcomes*). Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan Model Collaborative Governance dalam memperhatikan kearifan sosial dan pengembangan Desa Wisata Kemirahan Kabupaten Banyuwangi agar menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan Wisata Desa Kemiren di Geopark Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi, mengalami peningkatan meskipun awalnya pengetahuan dan kerjasama masyarakat rendah. Kepemimpinan fasilitatif dan kolaborasi pemangku kepentingan telah terjadi, didukung oleh desain kelembagaan dan proses kolaboratif.

Januari *et al.*,(2024) juga melakukan penelitian tentang kolaborasi pengembangan wisata dengan judul “Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.” Tujuan penelitian untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaboratif pengembangan pariwisata berbasis komunitas pada event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja faktor penghambat kolaborasi. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teori utama yang digunakan adalah teori pentahelix dari Arif Yahya dan teori *collaborative governance* dari Emerson dengan fokus pada dinamika kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya Pacu Jalur, telah berjalan cukup optimal. Namun, teridentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk kurangnya koordinator pentahelix, dukungan infrastruktur jalan yang minim, dan rendahnya kreativitas dan inovasi di lokasi wisata Pacu Jalur.

Ardiansyah Imam (2021) juga melakukan penelitian tentang *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata dengan judul “Analisis *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemangku kepentingan utama di Alam Gunung Pancar Taman yang berperan dalam pengelolaan ekowisata. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan teori utama pemetaan *stakeholder* dari Reed, A, & Dandy dengan penekanan pada kepentingan dan kekuatan pada tiap *stakeholder*. Teori pemetaan tersebut kemudian di gabungkan dengan teori dari (Nurkhalis, Arief, & Sunarminto, 2018) , kepentingan yang dinilai ,yaitu (1) Keterlibatan *stakeholder* (2) Manfaat pengelolaan (3) Sumber daya yang

disediakan. (4) Prioritas pengelolaan dan (5) Ketergantungan sumberdaya. Sedangkan untuk aspek pengaruh yang dinilai, yaitu (1) Aturan atau kebijakan (2) Peran dan partisipasi (3) Kemampuan dalam berinteraksi dan mempengaruhi (4) Kewenangan dalam pengelolaan (5) Kapasitas sumber daya yang disediakan. Hasil penelitian menunjukkan Studi ini mengidentifikasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Mereka dibagi menjadi Subjek (8), Pemain Kunci (4), Penentu Konteks (6), dan Kelompok (5). Ditemukan bahwa peningkatan hubungan di antara mereka dapat memperkuat pengembangan ekowisata melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih baik, sesuai dengan peran masing-masing.

Hidayah *et al.*, (2019) juga melakukan penelitian tentang *stakeholder* dalam pengembangan wisata dengan judul “ Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.” Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat. Teori utama yang digunakan adalah Teori Klasifikasi *Stakeholder* dari Bryson yang meliputi (*Contest Setter, Players, Subject* dan *Crowd*). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemangku kepentingan terlibat \dalam pengembangan pariwisata Talang Air terdiri dari masyarakat, pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan pariwisata Talang Air telah melakukan berbagai pengembangan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Kerja sama dan komunikasi yang terjalin antar pemangku kepentingan relatif baik sehingga mempercepat proses pelaksanaan pengembangan pariwisata Talang Air.

Saputra Napitulu *et al.*, (2020) juga melakukan penelitian tentang *stakeholder* dengan judul “Peran *Stakeholder* Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.” Tujuan penelitian untuk mengetahui jaringan *stakeholders* dan peran dari setiap *stakeholders* dalam program pengentasan kemiskinan. Teori utama yang dipakai adalah kategori *stakeholder* dari Viney (primer, sekunder, tersier dan kwarter) dan teori peran *stakeholder* dari Nugroho meliputi (*policy creator, coordinator, fasilitator, implementor dan akselerator*). Hasil penelitian menunjukkan Diperlukan peningkatan koordinasi di dalam setiap jaringan *stakeholder* yang melibatkan empat jaringan yang memiliki peran berbeda dari masing-masing *stakeholder*. Dalam konteks ini, Dinas Sosial harus lebih dari sekadar penyedia data mereka juga diharapkan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Terakhir penelitian dari Moreta & Harirah M.S.,(2023) Juga meneliti tentang *collaborative governance* dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* yang telah dilakukan agar Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan cepat pulih. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. teori utama yang dipakai adalah *Collaborative Governance Regime (CGR)* dari Emerson yang meliputi (Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, Dampak). Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi belum sepenuhnya efektif karena tidak semua orang menyadari bahwa daerah mereka merupakan tujuan wisata. Namun, pihak lain yang terlibat telah

melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan dampak positif bagi beberapa komunitas.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Alfiandri <i>et al.</i> ,(2022) "Collaborative Governance Model for Mangrove Ecotourism: Bintan Island Case, Indonesia" Research Square Journal : 1-26	Metode Deskriptif Kualitatif Teori konteks analitis <i>Collaborative Governance</i> (Alfiandri <i>et al.</i> , 2022) yang meliputi : 1. Proses Kolaborasi Komitmen terhadap proses - Saling ketergantungan - Keterbukaan - Kepemilikan bersama atas proses Dialog tatap muka Hasil Menengah - Pencarian fakta bersama - Kemenangan kecil - Rencana strategis Pemahaman Bersama - Misi yang jelas	pemangku kepentingan dapat memanfaatkan kebijakan konservasi Mangrove di Pulau Bintan untuk membentuk model <i>collaborative governance</i> yang bersifat bottom-up dan top-down

		<ul style="list-style-type: none"> - Definisi masalah umum - Identifikasi nilai nilai umum <p>2. Kepemimpinan yang memadai</p> <p>3. Desain Institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan dasar yang jelas - Eksklusivitas forum - Inklusivitas partisipatif - Transparansi proses <p>4. Kondisi awal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif dan kendala partisipatif - Asimetri kekuasaan sumber daya pengetahuan - Prasejarah kerja sama /konflik 	
2.	<p>Umar et al., (2019) "Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan". <i>Matra Pembaruan</i>, 3(1) : 57 -66</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif Teori Proses Kolaborasi Ansell and Gash (2007, p. 543-571), yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog antar muka 2. Membangun kepercayaan 3. Komitmen pada proses 4. Pemahaman bersama 5. Dampak sementara 	<p>Pembangunan Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh setiap pelaku melalui praktik kolaboratif yang melibatkan koordinasi dengan instansi pemerintah setempat. Kabupaten Sinjai telah berhasil menciptakan partisipasi aktif dan sinergi di antara para pelaku, dengan komunikasi yang efektif, keterbukaan, dan kemampuan untuk membangun</p>

			kepercayaan serta komitmen bersama.
3.	Choirul Ramadhan <i>et al.</i> , (2021). "Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Desa Wisata Kandri Kota Semarang".JPPMR. 4(1).	Metode Deskriptif Kualitatif Teori model <i>collaborative governance</i> . Ansell and Gash Yang memiliki 4 variabel ,yaitu : 1. <i>Starting condition</i> 2. <i>institutional design</i> 3. <i>leadership fasilitative</i> 4. <i>collaborative process</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses kolaborasi yang telah dilakukan yang dilakukan selama ini mengalami beberapa kendala yang dibuktikan dengan analisis Ansell dan Model tata kelola kolaboratif Gash seperti bagaimana membangun hubungan, dialog Kerjasama model, rapat dan komitmen yang dilaksanakan serta Pembagian Peran dan Tanggung jawab
4.	Yuningsih <i>et al.</i> , (2019). "Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang". JPSI (Journal of Public Sector Innovations). 3,(2) : 84-93	Metode Deskriptif kualitatif Teori Model Kolaborasi <i>Stakeholder</i> Pentahelix (Arif Yahya). Yang meliputi : 1. <i>Academician</i> 2. <i>Business</i> , 3. <i>Community</i> , 4. <i>Government</i> dan 5. <i>Media</i> . Yang kemudian disingkat ABCGM.	: (1) Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model pentahelix, sudah melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa (2)Temuan lapangan adalah Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal dan (3)Kerjasama antar aktor model pentahelix yang ada di kota Semarang dari hasil penelitian belum optimal

5.	<p>Purba <i>et al.</i>, (2021). "Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang". <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>, 10(2) : 183 - 209</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif Teori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori aktor berdasarkan pengaruh dan kepentingan. viney (dalam Suwitri 2011) <ul style="list-style-type: none"> - Primer - Sekunder - Tersier - Kwarter 2. Peran aktor menurut Riant Nugroho, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pembuat kebijakan - Koordinator - Fasilitator - Implementor - Akselerator 3. Model Jaringan Aktor menurut Michel Callon, Bruno Latour, serta John Law pada tahun 1980-an (dalam Johannes Eka, 2013: 4) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Model Triple Helix</i> (Universitas, Industri, Pemerintah) - <i>Quadruple Helix</i> (Universitas, Industri, Pemerintah, dan masyarakat sipil) - <i>Model Penta Helix</i> (Academician, Business, Community, 	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi quadruple helix dalam pengembangan wisata Wonolopo, yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa. Namun, jaringan aktor yang terbentuk belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dari DISBUDPAR dengan mengadakan pertemuan antar aktor untuk memaksimalkan peran masing-masing aktor yang terlibat..</p>
----	---	--	--

		Government dan Mass Media) biasa disingkat ABCGM	
6.	Rohmania <i>et al.</i> , (2022). "Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya". <i>Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)</i> , 1(1) : 69 - 78.	Metode Deskriptif Kualitatif Teori Model Pentahelix menurut Kotler <i>et al</i> dalam Dian K, Duadji,N. dan Intan F M. (2021), yang meliputi : 1. <i>Business</i> 2. <i>Government</i> 3. <i>Community</i> 4. <i>Academic</i> 5. <i>media</i>	penelitian menunjukkan bahwa peran aktor Pentahelix dalam pengembangan wisata taman aggrek belum berjalan dengan optimal. Pemerintah mendominasi mulai dari perencanaan, pembangunan, penganggaran hingga promosi dan keterlibatan <i>stakeholder</i> lain yang masih terbatas.
7.	I Gede Eko Putra Sri Sentanu <i>et al.</i> , (2021). " Model Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Ekowisata: Studi Kasus dari Kota Batu, Provinsi Jawa Timur ". <i>JGCS</i> . 5,(2) : 214- 236.	Metode Deskriptif kualitatif Teori Teori Pentahelix dengan penggabungan prinsip <i>triple bottom</i> (lingkungan hidup, ekonomi dan sosial)	kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta-helix Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengembangan ekowisata di Kota Batu, Indonesia.
8.	Nuh <i>et al.</i> ,(2024). <i>Collaborative Governance Model In Sustainable Village</i>	Metode Kualitatif Teori	Wisata Desa Kemiren di Geopark Kawah Ijen, Kabupaten

	<p><i>TourismDevelopment (Case Study: Kemiren Village Tourism In Ijen Crater Geopark Cultural Site).Journal General Management.25, (199) : 310 – 318.</i></p>	<p>Model Kolaborasi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>starting condition,</i> 2. <i>Institutional design,</i> 3. <i>Facilitative Leadership,</i> 4. <i>Collaborative Process, and</i> 5. <i>Outcomes.</i> <p>Ansell and Gash (2008)</p>	<p>Banyuwangi, mengalami peningkatan meskipun awalnya pengetahuan dan kerjasama masyarakat rendah. Kepemimpinan fasilitatif dan kolaborasi pemangku kepentingan telah terjadi, didukung oleh desain kelembagaan dan proses kolaboratif.</p>
9.	<p>Januari <i>et al.</i>,(2024). Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kuantan SingingiEgo. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH). 3,(1) : 19 -34</p>	<p>Metode Kualitatif Teori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentahelix <i>Academician</i> (Akademisi), <i>Business</i> (Bisnis), <i>Community</i> (Komunitas), <i>Government</i> (Pemerintahan), dan <i>Media</i> (Publikasi) atau biasa disingkat menjadi ABCGM. Arif Yahya (2014) 2. Kolaborasi, yang meliputi Motivasi Bersama, Saling Percaya, Saling Pengertian, Legitimasi Interal, Komitmen. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) 	<p>Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya Pacu Jalur, telah berjalan cukup optimal. Namun, teridentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk kurangnya koordinator pentahelix, dukungan infrastruktur jalan yang minim, dan rendahnya kreativitas dan inovasi di lokasi wisata Pacu Jalur.</p>
10.	<p>Ardiansyah, Imam (2021). Analisis <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Ekowisata di Taman</p>	<p>Metode Kualitatif Teori Klasifikasi <i>Stakeholder</i></p>	<p>Studi ini mengidentifikasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang</p>

	Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. Jurnal EDUTURISMA. (6),1 ;1-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Key Player</i> 2. <i>Subject</i> 3. <i>Context Setter</i> 4. <i>Crowd</i> (Reed, A, & Dandy, 2009)	terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Mereka dibagi menjadi Subjek (8), Pemain Kunci (4), Penentu Konteks (6), dan Kelompok (5). Ditemukan bahwa peningkatan hubungan di antara mereka dapat memperkuat pengembangan ekowisata melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih baik, sesuai dengan peran masing-masing.
11.	Hidayah <i>et al.</i> , (2019). Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. Jurnal Adminstrasi Publik. 7,(1) ; 55 -71	Metode Kualitatif Teori Klasifikasi <i>Stakeholder</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Contest Setter</i> 2. <i>Players</i> 3. <i>Subject</i> 4. <i>Crowd</i> Bryson dalam Hardiansyah (2012:191)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Talang Air meliputi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Mereka telah melakukan berbagai pengembangan, baik fisik maupun non-fisik.
12	Saputra Napitupulu <i>et al.</i> ,(2020). PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGENTASAN KEMISKINANKELompok NELAYAN DI KELURAHAN TANJUNG	Metode Kualitatif Teori Kategori <i>Stakeholder</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Sekunder 3. Tersier 4. Kwartir 	Diperlukan peningkatan koordinasi di dalam setiap jaringan <i>stakeholder</i> yang melibatkan empat jaringan yang memiliki peran berbeda dari masing-

	MAS,KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG. Jurnal UNDIP.	Viney dalam Suwitri, (2011) Peran <i>stakeholder</i> 1. <i>Policy creator</i> 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator Nugroho dalam Fitri & Hardi, (2017)	masing <i>stakeholder</i> . Dalam konteks ini, Dinas Sosial harus lebih dari sekadar penyedia data; mereka juga diharapkan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
13.	Moreta & Harirah MS. (2023). <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022. <i>Journal of Social and Policy Issues</i> . 3, (3) ; 106 - 112	Metode Kualitatif Teori <i>Collaborative Governance</i> Regime (CGR) 1. Dinamika Kolaborasi 2. Tindakan Kolaborasi 3. Dampak dan adaptasi sementara Nabatchi & Balogh (2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya efektif karena tidak semua orang menyadari bahwa daerah mereka merupakan tujuan wisata. Namun, pihak lain yang terlibat telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan dampak positif bagi beberapa komunitas.

sumber : Jurnal diolah peneliti (2024).

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu memberikan manfaat bagi peneliti untuk memahami fenomena dan subfenomena terkait kolaborasi *stakeholder*. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam hal fokus dan tipe penelitian. Dikarenakan peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan . Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang pemetaan *stakeholder* dan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan wisata pada suatu daerah. Namun disini yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu adalah lokus penelitian. Dari penelitian

terdahulu yang diuraikan belum ada penelitian yang membahas tentang kolaborasi *stakeholder* yang ada di ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo. Perbedaan yang lain fokus dari penelitian. Hal tersebut dibuktikan bahwasannya pada semua penelitian terdahulu dapat dikatakan hanya memiliki satu fokus. Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya Sehingga focus penelitian adalah Pemetaan dan Kolaborasi *stakeholder*. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba untuk menggabungkan dua focus tersebut dalam satu penelitian. Karena pada dasarnya kolaborasi *stakeholder* tidak terlepas dari siapa saja yang terlibat dan proses yang terjadi. Perbedaan selanjutnya yang paling jelas adalah penggunaan teori. Pada teori pemetaan *stakeholder* peneliti lebih memilih teori dari Eden and Ackerman, yang kemudian dikombinasikan dengan pendapat dari Nurkhalis, dkk. Dalam hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu dari Ardiansyah (2021) tetapi sekali lagi ada perbedaan mendasar. Dikarenakan penelitian tersebut hanya sebatas memetakan tetapi peneliti juga ingin melihat bagaimana kolaborasi yang terjadi dan menggunakan teori dari Emerson.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik berasal dari dua kata, yaitu adminisrasi dan publik. Administrasi sendiri merupakan suatu kegiatan pelayanan. Sehingga melibatkan 2 orang atau lebih. Sedangkan public berarti masyarakat secara umum. Secara sederhana administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3), administrasi publik dapat diartikan sebagai proses sumber daya diorganisir dan

dikooordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (memanage) kebijakan publik yang telah menjadi keputusan.

Menurut Dimock dan Dimock (1992:19), administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang cakupannya lebih luas. Ilmu ini mempelajari bagaimana berbagai lembaga, mulai dari keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa, disusun, dijalankan, dan diarahkan. Ini menunjukkan bahwa aspek manajerial sangat dominan, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal itu disampaikan oleh Osborne yaitu :

1. Berfokus pada pengarahan daripada pelaksanaan (katalisator).
2. Memperluas kewenangan kepada masyarakat (fasilitator).
3. Mendorong adanya persaingan yang sehat (motivator).
4. Memproduksi daripada hanya menghabiskan anggaran (entrepreneur).
5. Tata kelola publik: sebagai pengalokasi, pendistribusi, dan penstabil barang publik.

Penelitian yang dilakukan merupakan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo. Kolaborasi *stakeholder* sendiri merupakan bagian dari kajian administrasi publik. Dari sudut pandang administrasi publik, kolaborasi adalah suatu upaya bersama yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Itu sudah pasti. juga sependapat dengan persepsi administrasi Administrasi itu sendiri adalah

kemitraan antara dua individu atau lebih untuk menyelesaikan suatu tugas (Muhammad Noor, 2022).

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Kata Yunani "*paradeigma*," yang berarti pola atau contoh, adalah asal kata "paradigma" berasal. Mengenai perspektif paradigma pengembangan administrasi publik, para ilmuwan agaknya sepakat pada beberapa gagasan. Nicholas Henry misalnya tahun 1975 telah beberapa kali memperbarui *worldview* implementasi kebijakan. Pada tahap awal menyatakan bahwa ada empat model ideal formatif, namun pada akhirnya menyimpulkan ada enam pergeseran paradigma administrasi publik yang meliputi :

1. Dikotomi Politik - Administrasi, yang ada antara tahun 1900 dan 1926. Premis utama dari paradigma ini adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk memisahkan operasi politik dan pemerintahan. Dalam esainya "*The Study of Administration*," yang muncul di *Political Science Quarterly* pada tahun 1897, Woodrow Wilson menyiapkan landasan bagi cara berpikir ini (Basheka, 2012). Woodrow Wilson menguraikan empat persyaratan untuk administrasi publik yang efisien: (1) klasifikasi politik dan administratif; (2) analisis komparatif organisasi politik dan swasta; (3) meningkatkan praktik dan sikap bisnis terhadap operasional sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi; dan (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pelatihan manajemen dan pegawai negeri sipil serta mendorong evaluasi berbasis prestasi. Paradigma ini memberikan landasan yang kokoh bagi teori administrasi publik. Lebih penting

lagi, paradigma ini bertujuan untuk memberikan orientasi ilmiah dengan membedakan antara “fakta” dan “nilai” (Henry, 2007).

2. *The Principles of Administration* atau *Standards of Organization* (1927 – 1937), mengkaji standar-standar organisasi. Penerbitan buku W. “Principles of Public Administration” menandai dimulainya paradigma ini. Pada tahun 1927, Willoughby (Willoughby, 1927). Karya penting lainnya termasuk "*Pengalaman Kreatif*" karya Mary Parker Follett (Follett, 1924), "*Manajemen Industri dan Umum*" karya Henry Fayol (Henri Fayol dan Coubrough, 1930), dan "*Prinsip Organisasi*" karya James D. Mooney dan Alan C. Setidaknya ada tujuh prinsip administrasi (Perencanaan, Pengorganisasian, Kepegawaian, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran). Menurut Lyndall *et al.*, prinsip-prinsip administratif adalah fokus utama dari paradigma kedua ini, dan prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat diterapkan secara universal pada setiap jenis organisasi dan lingkungan sosial budaya.
3. *Public Administration as Political Science*, (1950 – 1970), paradigma yang ketiga "*Public Administration as Political Science*", digambarkan oleh Henry sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (Henry, 2007). Henry melihat adanya keinginan yang kuat oleh ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Pada periode yang sama, ada pula peningkatan upaya dari ilmuwan manajemen juga mengklaim disiplin ilmu administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, karena itulah mengapa

administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya, yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan.

4. *Public Administration as Management*, (1956 – 1970), paradigma keempat yang dikenal dengan “*public Administration as Management*” atau “administrasi publik sebagai manajemen” didirikan oleh Henry. Integrasi administrasi publik ke dalam ilmu manajemen selama ini merupakan sebuah kemenangan bagi para ilmuwan manajemen. Dalam paradigma ketiga dan keempat, politik dan manajemen, dua bidang keilmuan, bersaing untuk mendapatkan pengakuan atas komponen keilmuan administrasi publik.
5. *Public Administration as Public Administration*, (1970 – sekarang), pada tahap “*public administration as public administration*” adalah tahap “*new publik management*” (NPM). Pada periode ini administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokus diidentifikasi berada pada hierarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dengan kata lain, ada perpindahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Dari berbagai tahap perkembangan administrasi publik, tahapan inilah yang paling diakui oleh Hendry. Pada tahap ini, sangat nyata dan jelas perubahannya. NPM juga menghadapi masalah juga yakni ketakefisienan dalam sistem administrasi. Hal ini berasal dari konsep perpaduan teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. Paradigma NPM adalah pergeseran untuk menggunakan sektor swasta. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal sebagai konsep “*governance*”

6. *Governance*, (1990 – sekarang), Proses mendasar pemerintahan modern yang berbeda dari pemerintahan tradisional disebut sebagai tata kelola. Ikeanyibe (2016) mengatakan bahwa warga negara dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik yang penting sebagai aspek yang lebih umum dari proses politik. Meskipun pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan, tata kelola memerlukan sektor lain (yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara finansial) untuk menyediakan layanan. Secara umum, tata kelola memerlukan penyediaan layanan kepada jaringan bisnis swasta, organisasi nirlaba, dan tingkat pemerintahan lainnya (desentralisasi/pembagian kekuasaan dan fungsi) (Ewalt, 2001). Kemitraan merupakan hal yang mendasar bagi berfungsinya fungsi-fungsi pemerintah dalam pemerintahan. Sektor publik dan swasta, penduduk lokal, dan organisasi masyarakat semuanya merupakan bagian dari kemitraan ini (Gibson, 2011).

Analisis kolaborasi *stakeholder* pada penelitian ini dari enam paradigma tersebut masuk kepada paradigma ke-enam. Dikarenakan menurut Dwiyanto (2004) dalam (Darmanto, 2023), dilihat dari segi dimensi maka ada beberapa dimensi penting dari *governance* yang meliputi :

1. Dimensi kelembagaan

Governance adalah sistem administrasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Studi tentang *governance* menekankan keterlibatan berbagai organisasi dan aktor dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk merespons masalah dan kebutuhan publik. Pada dimensi inilah

kemudian muncul teori pemetaan *stakeholder* yang berguna untuk mengidentifikasi para *stakeholder* yang terlibat.

2. Dimensi nilai

Governance adalah prinsip dasar yang digunakan dalam pemanfaatan kekuasaan. Dalam governance, pemanfaatan kekuasaan harus berdasarkan nilai-nilai yang lebih kompleks daripada sekadar efisiensi dan efektivitas, atau nilai-nilai yang sebelumnya diusung oleh gerakan administrasi negara baru. Efisiensi, efektivitas, keadilan sosial, dan demokrasi merupakan beberapa nilai yang umum digunakan untuk mengevaluasi praktik governance yang baik.

3. Dimensi proses

Tata kelola atau *governance* merupakan bagian dari proses yang berupaya menjelaskan bagaimana berbagai institusi dan elemen memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan publik yang muncul di lingkungan sekitar. Tata kelola relevan di sini. dipahami sebagai sebuah metode di mana para pemimpin dan perintis strategi dari berbagai yayasan di dalam dan di luar pemerintahan, menyatukan jaringan untuk menangani proses pendekatan publik. Oleh karena itu, terdapat landasan fundamental yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam mewujudkan *good governance*, khususnya pemerintahan negara, masyarakat sipil (*civil society*), dan dunia usaha atau pasar. Pemeliharaan Baru-baru ini, tata kelola yang bertanggung jawab telah dibentuk. ketika otoritas politik, ekonomi, dan administratif digunakan Ada jaringan dan interaksi antara ketiga bagian ini. setara dan saling melengkapi. Kemitraan dan interaksi semacam ini adalah hal biasa. hanya dapat berkembang dalam lingkungan yang

saling percaya, Partisipasi, transparansi, dan pedoman yang jelas. Lebih lanjut pada dimensi ketiga ini kemudian yang mendasari teori-teori kolaborasi *stakeholder*. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses suatu kolaborasi terjadi dan kemudian dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi.

1.6.3 Stakeholder

Stanford Research Institute pertama kali menggunakan istilah “pemangku kepentingan” pada tahun 1963 (Friedman dan Miles, 2006). Menurut Carroll (1991), klasifikasi dan evaluasi konsep kinerja organisasi merupakan tujuan awal dari konsep pemangku kepentingan. Selain itu, Freeman berpendapat bahwa memahami hubungan antara pertemuan dan orang-orang yang berdampak atau terkena dampak suatu asosiasi adalah metode untuk mengevaluasi kelangsungan hidup asosiasi dalam mencapai tujuan (Arrozaaq, 2017).

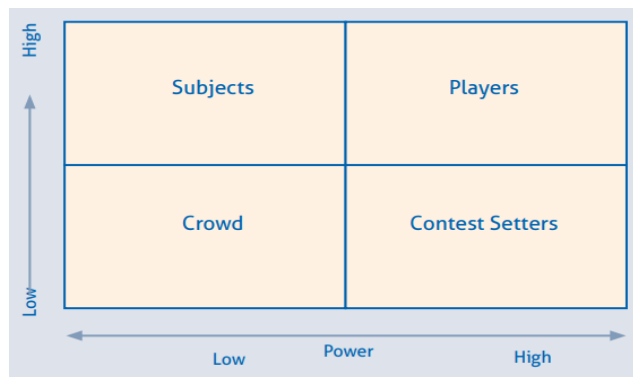
Individu, kelompok organisasi, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan pembangunan disebut sebagai pemangku kepentingan (Hertifah, 2003). Scheemer (2000) juga menyatakan hal serupa, mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu, kelompok, dan organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan yang sedang disusun. Sebaliknya, Gonsalves dkk. mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu program, kebijakan, atau kegiatan pembangunan. Pemangku kepentingan dapat berupa individu, komunitas, kelompok sosial, atau lembaga yang ada di seluruh lapisan masyarakat.

1.6.4 Stakeholder Mapping (*Interest vs Power*)

Menurut (LAN, 2015: 118), pemetaan *stakeholder* merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut tentang apa itu definisi pemetaan *stakeholder*. Lebih lanjut menurut r. Menurut WHO (2007) dalam (LAN, 2015 : 119) pemetaan *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan.

Menurut Eden and Ackermann (1998 ; 122) dalam Lembaga Administrasi negara (2015), *stakeholder* dapat diklasifikasikan dari gambar berikut ini :

Gambar 1. 1 Klasifikasi Stakeholder Menurut Eden dan Ackermann



Sumber : (LAN, 2015)

Berdasarkan gambar tersebut *stakeholder* dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yang meliputi :

1. *Contest setter* , merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi, tetapi sedikit kepentingan.

2. *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/ program,
3. *Subject*, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruhnya rendah, walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya, dan
4. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikut sertakannya dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut menurut Nurkhalis, Arief, & Sunarminto (2018) dalam (Ardiansyah, 2021 : 6), Untuk penilaian tingkat kepentingan dan pengaruh menurut ada lima kriteria yang digunakan. Pada aspek kepentingan yang dinilai, yaitu (1) Keterlibatan (2) Manfaat yang dituju (3) Kepentingan sumber daya . (4) Prioritas (5) Ketergantungan sumberdaya. Sedangkan untuk aspek pengaruh yang dinilai, yaitu (1) Aturan atau landasan hukum (2) Peran dan partisipasi (3) Kemampuan dalam berinteraksi dan pengaruh (4) Kewenangan (5) Kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.6.5 Collaborative Governance

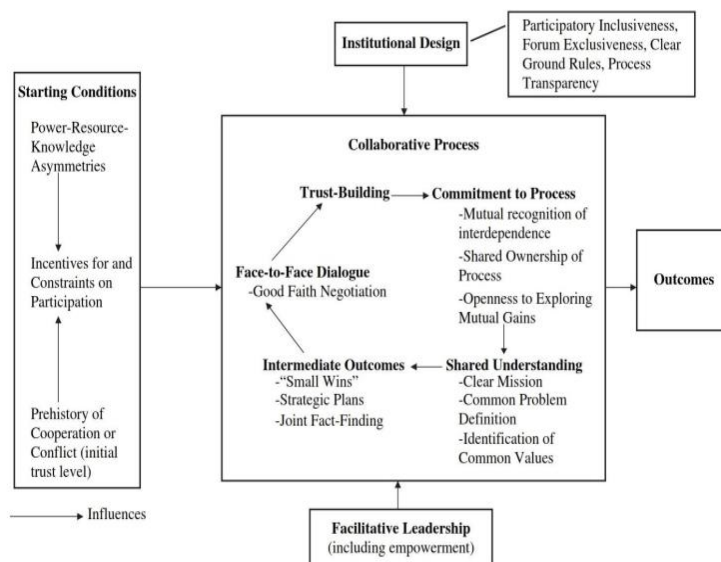
Pada awalnya, muncul dalam pandangan dunia administrasi . Sejalan dengan kemajuan dalam inovasi dan SDM yang membuat otoritas publik menghadapi permasalahan kompleks yang tidak dapat ditangani sendiri, oleh otoritas publik tanpa melibatkan mitra di luar otoritas publik. *Collaborative*

governance merupakan sebuah metode dalam penyusunan kebijakan publik dan manajemen publik yang melibatkan aktor-aktor dari luar pemerintahan, seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, LSM, dan organisasi non-pemerintah lainnya, untuk bersama-sama mengelola kepentingan public (Emerson & Nabatchi, 2015 dalam Muhammad Noor, 2022 : 45).

1.6.6 Teori Bentuk-Bentuk Collaborative Governance Menurut Ahli

1. Ansell *and* Gash (2008)

Gambar 1. 2 Model Collaborative Governance Ansell and Gash



Sumber : (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020)

Dalam jurnalnya “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” merumuskan model *collaborative* governance berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama yang meliputi :

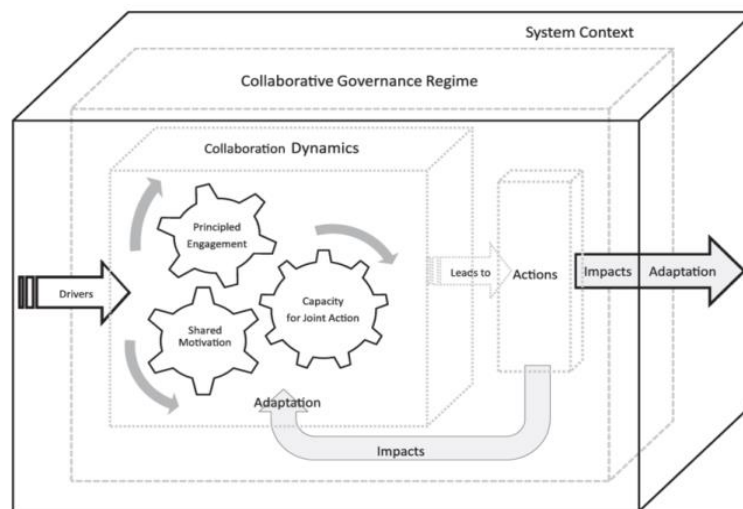
1. Kondisi awal, memungkinkan adanya tingkat kerja sama yang sama antar individu dan antara individu dengan organisasi dan individu.

2. Desain kelembagaan, merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam eksposisi berkolaborasi.
3. Kepemimpinan, dalam hal kolaborasi kemungkinan besar akan terjadi konflik atau kemunduran yang tidak terselesaikan serta tingginya tingkat perselisihan antar pihak yang terlibat. Namun, skenario ini cenderung mengakibatkan kurangnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka. Sebagai pemimpin dapat berperan sebagai *mediator* untuk menyelesaikan permasalahan.
4. Proses kolaboratif, menurut pendapat Ansell & Gash proses kolaboratif setidaknya memiliki lima proses diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. komunikasi tatap muka, dialog antar pemangku kepentingan adalah landasan bagi seluruh tata kelola kolaboratif. Pertukaran ini merupakan suatu interaksi yang terletak pada timbulnya kesepakatan/pemahaman.
 - b. Proses dialog tidak lepas dari tumbuhnya rasa saling percaya, Pemangku kepentingan harus bisa mempercayai pemimpin kolaborasi.
 - c. Kondisi saling ketergantungan, memungkinkan untuk dapat meningkatkan komitmen berkolaborasi dan komitmen terhadap proses kolaborasi.
 - d. Para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai pada suatu saat.
 - e. Hasil antara (tengah), merupakan hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi akan terus dirasakan secara nyata. Membangun kepercayaan dan

komitmen pemangku kepentingan dapat dipicu oleh hasil-hasil yang tampaknya tidak signifikan, atau kemenangan-kemenangan kecil.

2. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011)

Gambar 1. 3 Bentuk Collaborative Governance Menurut Emerson et al



Sumber : (Astuti, R.S et al., 2020)

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011), Collaborative Governance adalah suatu metode dan struktur pengelolaan dan perumusan keputusan kebijakan yang secara konstruktif melibatkan aktor-aktor dari berbagai tingkatan, termasuk lembaga pemerintah (lembaga publik), lembaga swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan. tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi mutlak diperlukan karena adanya saling ketergantungan antara aktor dan organisasi. Semakin menonjol ketergantungannya, baik secara merata maupun dilihat dari grafik vertikal, maka semakin menonjol pula perlunya upaya bersama. Administrasi koperasi merupakan suatu cara yang diharapkan dapat memberikan sifat sederhana namun kompleks antara otoritas publik, wilayah rahasia dan masyarakat untuk

mencapai kesepakatan yang sama sehingga dapat menghasilkan titik temu yang terbaik. Sebagai pendekatan praktis untuk mengevaluasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, terdapat banyak model tata kelola kolaboratif. Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Stephan Balogh, Tina Nabatchi, dan Kirk Emerson adalah salah satunya. Meskipun model CGR dianggap sederhana, namun model ini memberikan analisis mendalam mengenai proses kolaborasi, mulai dari masukan hingga pemicu dampak. Mulai dari konteks sistem dan pendorong hingga kolaborasi dinamis, tindakan, dampak, dan adaptasi, kerangka CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif. Menurut model CGR, proses kolaborasi antar aktor yang terlibat (*stakeholder*), baik pemerintah maupun non-pemerintah, perlu mengacu pada kerjasama jangka panjang. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), proses kolaborasi terdiri dari tiga komponen: (1) dinamika kolaborasi; (2) tindakan kolaborasi; dan (3) dampak

1.6.7 Ekowisata

Menurut Qomariah (2009) dalam (ADHARANI *et al.*, 2020 : 185) pengertian ekowisata adalah pariwisata yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menikmati berbagai jenis keanekaragaman hayati tanpa merusaknya. Dalam Deklarasi Quebec, menjelaskan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang membedakannya dengan bentuk wisata lain (Damanik & Weber dalam Bakhtiar, 2022). Lebih lanjut menurut Damanik & Weber dalam (Bakhtiar 2022) , terdapat tiga konsep dasar yang lebih operasional mengenai ekowisata , yaitu:

1. bepergian di alam bebas dan di kawasan alami yang merusak lingkungan.
2. Pemanfaatan prasarana transportasi yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat setempat di kawasan wisata diprioritaskan dalam ekowisata.
3. Latihan ekowisata berpusat pada habitat umum dan budaya lingkungan sekitar.

Damanik dan Weber dalam (Mohamad Mirza, 2022), menjabarkan prinsip-prinsip ekowisata yang meliputi :

1. Mengurangi dampak buruk atau pencemaran terhadap lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan pariwisata.
2. Menjadikan wisatawan, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata lainnya lebih sadar dan menghargai lingkungan dan budaya di kawasan wisata.
3. Memberikan pengalaman positif kepada wisatawan dan masyarakat lokal dengan membina pertukaran budaya dan berkolaborasi dalam konservasi dan/atau pelestarian daya tarik wisata (OBDTW).
4. Memberikan kontribusi atau biaya tambahan wisata yang memberikan manfaat langsung bagi upaya pelestarian alam.
5. Menciptakan produk pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal, yang pada gilirannya memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi.
6. Meningkatkan kesadaran terhadap keadaan politik, lingkungan hidup, dan sosial di kawasan wisata
7. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sesuai aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam melakukan transaksi pariwisata,

memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati destinasi wisata.

1.6.8 Mangrove

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang memiliki ciri khas, tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut, khususnya di dekat muara, sungai, laguna, dan pantai yang terlindungi dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir (Prihadi et.al, dalam Bakhtiar, 2022). Menurut Prabowo (2020), Istilah “mangrove” didefinisikan secara beragam oleh para ahli, namun pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama. Tomlinson (1986) dan Wightman (1989) dalam (Prabowo, 2020), mendefinisikan mangrove baik sebagai tumbuhan yang ditemukan di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan pesisir khas di pantai tropis dan subtropis yang dilindungi (Saenger, dkk, 1983). Sedangkan Soerianegara (1987) mendefinisikan hutan mangrove sebagai hutan yang tumbuh terutama pada tanah lumpur aluvial di daerah pesisir dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan terdiri dari jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aigeceras*, *Scyphyhora* dan *Nypa*. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2010, menyatakan bahwa seluruh kesatuan antara mangrove, hewan, dan organisme lain yang saling berinteraksi terhadap sesama dengan lingkungannya, disebut sebagai ekosistem mangrove.

Lebih lanjut menurut Hamilton & Snedacker (1984) dalam (Bakhtiar, 2022), pengelompokan hutan mangrove secara geomorfologi, meliputi :

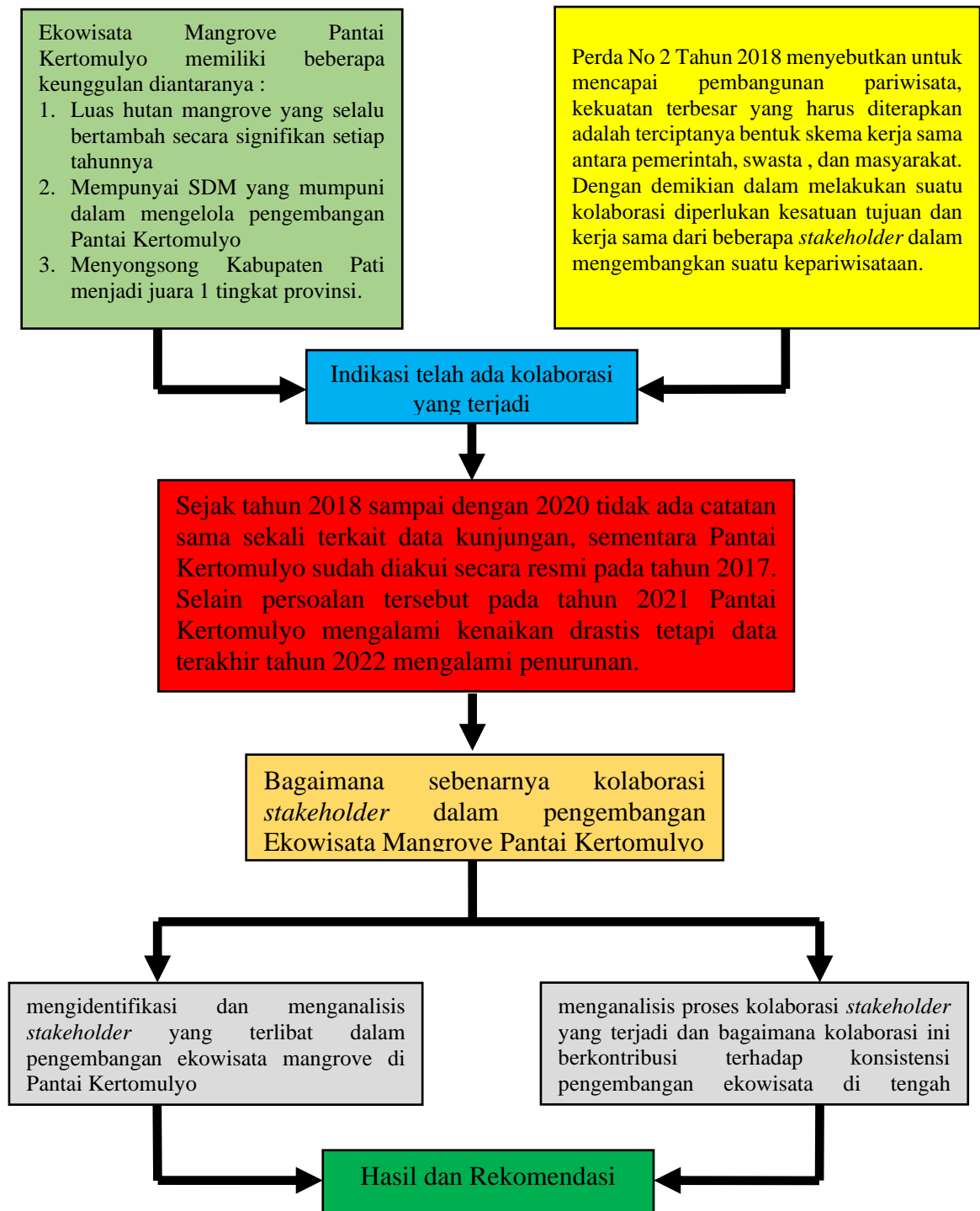
1. *Overwash mangrove forest*, varietas ini memiliki bentuk pulau tersendiri. Jenis bakau merah mendominasi wilayah ini. Tumbuh di daerah yang sering terendam air pasang dan banjir. Namun, meski dalam kondisi ekstrem, varietas ini tetap produktif, dengan tinggi pohon mencapai 7 meter
2. *Fringe mangrove forest*, jenis ini terdapat di pulau-pulau atau garis pantai yang terlindung dari gelombang dan arus. Daerah seperti ini memiliki struktur akar yang kuat dan sering terkena pasang surut air laut. Dusun bakau jenis ini mempunyai kemampuan sebagai pelindung pantai dan dapat tumbuh hingga ketinggian 10 meter.
3. *Riverine mangrove forest*, Jenis ini ditemukan di daerah tempat sungai dan aliran sungai bertemu laut setiap hari. Di sekitar sini terjadi pertemuan antara aliran air baru dari daratan dan air lautan. Tingginya tingkat sedimentasi di wilayah ini disebabkan oleh pertemuan tersebut. Pohon bakau jenis ini tingginya bisa mencapai 18 hingga 20 meter. Karena tingginya sedimentasi di wilayah ini, jenis ini paling produktif karena memiliki konsentrasi unsur hara yang tinggi bagi tanaman.
4. *Basin mangrove forest*, jenis ini tumbuh di tempat yang menonjol jauh ke dalam daratan. Daerah ini dibasahi secara tidak teratur oleh gelombang dan gelombang air laut. Dengan tinggi pohon maksimal 15 meter, jenis ini merupakan sumber produksi kayu
5. *Hammock forest*, jenis ini mirip dengan bakau basin, namun letaknya lebih tinggi. Wilayah ini jarang sekali terbasahi oleh gelombang atau gelombang laut. Pohon itu jarang tumbuh melebihi 5 meter

6. *Scrub atau dwarf forest*, ciri-ciri hutan bakau ini dapat ditemukan di lingkungan yang keras. Ombak jarang menyediakan air laut bagi wilayah ini. Ketinggian pepohonan di ruangan ini kira-kira 1,5 meter.

Mangrove adalah suatu ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir yang tergenang air, baik di perairan laut maupun estuari. Tumbuhan yang mendominasi ekosistem ini disebut dengan mangrove. Mangrove sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang memiliki iklim hangat. Dalam penelitian ini hutan mangrove yang dimaksud berada di Pantai Kertomulyo Kecamatan Trangkil, yang pada saat ini telah menjadi salah satu daerah ekowisata di Kabupaten Pati. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekowisata yang berperan penting dalam menjaga kelestarian alam. Potensi ekowisata di hutan mangrove sangat besar karena keunikan kondisinya dan konsep daerah yang dapat diproyeksikan menjadi tujuan pariwisata, dengan selalu mempertahankan keaslian lingkungan mangrove serta keberagaman makhluk hidup yang berekosistem di dalamnya. Menurut Karlina (2015) dalam (Asyifa, 2023 : 20), pemanfaatan kawasan mangrove sebagai pengembangan ekowisata merupakan pilihan yang sangat tepat dan logis di kawasan pesisir, karena ekowisata mangrove dapat memberikan manfaat finansial, berkontribusi dalam upaya pelestarian alam, serta mendorong upaya kegiatan konservasi ekosistem.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 4 Kerangka Penelitian



Sumber : Jurnal diolah peneliti (2024)

1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Subfenomena	Gejala Yang diamati	Teknik Pengumpulan Data
1	Aktor yang terlibat	a. Dimensi Kepentingan b. Dimensi kekuatan	- <i>Subject</i> - <i>Players</i> - <i>Contest Setter</i> - <i>Crowd</i>	Observasi Wawancara Dokumentasi
2	Proses olaborasi dalam pengembangan ekowisata	Dinamika Kolaborasi	a. Pergerakan prinsip bersama (<i>Principled engagement</i>) b. Motivasi bersama (<i>Shared Motivation</i>) c. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (<i>Capacity For joint action</i>)	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Tindakan Kolaborasi	a. Pengetahuan <i>stakeholder</i> tentang kolaborasi b. Tindakan Konkrit dalam pengembangan c. Peran teknologi dalam pengembangan	
		Dampak dan Hasil Tindakan	a. Dampak yang diinginkan b. Dampak yang tidak diinginkan c. Dampak tidak terduga	

Sumber : Jurnal diolah peneliti (2024)

1.9 Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab definisi permasalahan. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Creswell (2017: 4), dalam konteks penelitian kualitatif adalah proses menyelidiki dan memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok, yang menggambarkan isu sosial atau filantropis yang sebenarnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kualitatif berarti mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan isu-isu lingkungan sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode yang memadukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan serta triangulasi sumber data untuk mengumpulkan data dari berbagai informan. Panduan wawancara berfungsi sebagai instrumen data.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif menjadi fokus penelitian . Fokus metode penelitian kualitatif adalah pada observasi dan wawancara mendalam. Dalam metodologi subjektif ini, informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk menyelidiki kebenaran data tertentu dari berbagai teknik dan sumber pengamanan informasi. Seringkali peneliti memperoleh datanya dari berbicara langsung dengan objek penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dapat mengarah pada penyelidikan yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan para pelaku. Tugas

akhirnya adalah membuat laporan yang fleksibel dan terstruktur. Objek dan temuan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian menunjukkan wilayah atau ruang lingkup di mana penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini, lokus penelitian adalah Ekowisata Pantai Kertomulyo Kecamatan Trangkil. Fokus penelitian menunjukkan sudut pandang luar biasa yang menjadi perhatian penting dalam kegiatan penelitian. Analisis kolaborasi pemangku kepentingan dalam pertumbuhan ekowisata di Pantai Kertomulyo menjadi fokus utama penelitian ini. Fokus ini menekankan pentingnya kemitraan dan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan. Analisisnya berfokus pada identifikasi pemangku kepentingan dan proses kolaborasi.

1.9.3 Teknik *Sampling*

Istilah *sampling* dalam penelitian kualitatif, dapat diartikan sebagai teknik pengambilan subjek penelitian (Nasution, 2023 : 79). Menurut Suharsimi Arikunto (2010), subjek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian dalam konteks orang atau informan ada beberapa hal yang bisa dilihat. Menurut Neuman (2000:374) dalam Nasution (2023 : 88-89), menjelaskan bahwa informan yang baik memiliki empat karakteristik sebagai berikut :

1. Informan telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang budaya lokal.
2. Dibutuhkan keterlibatan informan di lapangan.

3. Narasumber dapat meluangkan waktu bersama peneliti. karena terkadang wawancara memakan waktu lama.
4. Orang yang tidak analitis bisa menjadi informan yang lebih baik , dikarenakan mengetahui dan menggunakan hipotesis asli setempat atau alasan yang membumi. Hal ini berbeda dengan informan analitis yang menggunakan kategori media atau pendidikan sebagai latar belakang pra-analisis.

Lebih lanjut dalam pengambilan subjek penelitian, secara garis besar ada dua macam yang meliputi :

1. *purposive sampling*

Purposive sampling atau *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada penilaian atau *judgment* peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel (Nasution, 2023 : 80). Selain itu, ketika dihadapkan pada kenyataan yang tidak tunggal, metode purposif dianggap lebih mampu menangkap kedalaman dan kelengkapan data. Jadi pilihan contohnya tidak memberikan tambahan pada sumber informasi yang dianggap memiliki data signifikan dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang dieksplorasi (Basrowi & Suwandi, 2014 : 102)

2. *snowball sampling*

Yaitu penentuan informan secara berantai, awalnya satu informan, kemudian dari informan tersebut memberikan informasi terkait dengan informan lainnya dan seterusnya sampai dirasa sudah ada kecukupan. Lebih lanjut menurut Yin (1987 : 55) dalam Basrowi & Suwandi (2014 : 104), menjelaskan Ketika peneliti tidak mengetahui kondisi masyarakat di lapangan, maka peneliti menggunakan

snowball sampling untuk menentukan siapa yang sebaiknya dijadikan sampel. Hasilnya, peneliti memilih orang-orang yang ditemuinya, dan peneliti dapat menanyakan informan pertama, yang mungkin kenal dengan orang lain dan memiliki data yang diperlukan untuk penelitian. Seorang peneliti dapat mengidentifikasi informan selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan pertama.

Lebih lanjut dari dua metode atau Teknik tersebut peneliti memakai teknik *purposive sampling*. Dikarenakan peneliti menginginkan data yang spesifik yang mendalam dari informan, yang benar-benar terlibat dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo. Sehingga diperoleh subjek penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Subjek Penelitian

No	Subjek penelitian
1.	Masyarakat
2.	Pokdarwis Tresno Segoro
3.	Pemerintah desa
4.	PPUP
5.	DINPORAPAR
6.	Misaja Mitra

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2013:157-158) dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata ataupun tindakan seperti wawancara, sumber tertulis, foto dan data statistik. Biasanya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data. Sumber data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung

(dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Berikut adalah penjelasan data dalam penelitian:

- a. Data primer, merupakan sumber eksplorasi informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa pertemuan, penilaian sentimen masyarakat dari orang-orang atau perkumpulan (individu) atau akibat persepsi terhadap suatu barang, peristiwa atau hasil percobaan.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada, atau arsip-arsip baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan secara umum. Data sekunder adalah contoh data sekunder. Sebaliknya, data sekunder penelitian ini berupa dokumen terkait penelitian, peraturan, tesis, disertasi, jurnal, berita, dan informasi online.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan dimanfaatkan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan datanya agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti merupakan instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian ini. Cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang meliputi pengamatan dan pencatatan keadaan atau perilaku objek sasaran.
2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dimana responden ditanyai dan dikomunikasikan secara langsung. Pewawancara dan responden berinteraksi

selama proses wawancara. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pertemuan tidak terstruktur dan wawancara terorganisir.

3. Data atau informasi yang diperoleh dari bahan dokumentasi lapangan dapat digunakan sebagai bahan verifikasi keabsahan data, dan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan dan kebenaran data atau informasi. Analisis dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik yang berada di lokasi penelitian maupun di luar lokasi penelitian.

1.9.6 Analisis dan Intepretasi Data

Dalam penelitian, analisis data terjadi bersamaan dengan pengumpulan data. Diantaranya melalui tiga tahap model air, yaitu penurunan informasi spesifik, menampilkan informasi, dan memeriksa. Bekerja dengan data, mengorganisasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, membuatnya konsisten, mencari pola, menentukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain merupakan aspek-aspek analisis data kualitatif. Menganalisis data dari lapangan melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memutuskan mana yang penting dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami. Cara-cara pembuatan data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan data secara spesifik.
2. Pengubahan informasi, khususnya proses pembersihan informasi, dan itu berarti memeriksa kembali tanggapan untuk memeriksa apakah tanggapan tersebut benar.

3. Reduksi informasi, yaitu informasi yang disederhanakan, dikurangi, dibersihkan, diorganisasikan, dan dihilangkan yang tidak berdasar.
4. Penyajian data, yaitu menyajikan data dengan menggunakan bahasa deskriptif.
5. Pemeriksaan informasi, khususnya evaluasi ulang redundansi informasi.
6. Data kesimpulan, disebut juga rumusan kesimpulan umum dan khusus dari hasil penelitian yang disajikan

1.10.7 Kualitas Data (Validitas Data)

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian perlu dilakukan akurasi data yang didasarkan sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Berbentuk validitas internal (alat ukur mencerminkan objek yang diukur) dan validitas eksternal (alat ukur dipakai pada penelitian berbeda). Keabsahan penelitian kita uji kualitasnya dengan cara melakukan Uji Kredibilitas yang menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2007:330) teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan isi lain (untuk kebutuhan pemeriksaan atau perbandingan dengan data) selain data itu sendiri dengan cara memeriksa sumber lain. Sedangkan menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2016:372) mengartikan bahwa triangulasi sebagai pemeriksaan data dari sumber, metode, dan waktu.